

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dapat membawa pengaruh bagi suatu negara, dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan masyarakat dari suatu negara untuk mengetahui dengan mudah keadaan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat negara lain, maka persaingan bebas harus diperhitungkan dari sekarang.

Salah satu bentuk konsekuensi dari globalisasi adalah makin meningkatnya intensitas perdagangan internasional serta interaksi masyarakat dunia. Dengan adanya sumber daya alam dan manusia yang berbeda diantara negara-negara yang ada didunia maka perdagangan internasional telah menjadi satu kebutuhan yang tidak terelakkan dari masing masing negara.

Internasionalisasi pasar merupakan awal dari sebuah ekonomi global. Yang dimaksudkan dengan "Internasionalisasi Pasar" adalah pemerintah dan kalangan pengusaha berusaha supaya titik berat pasar usaha industri atau pertanian maupun perdagangan mengarah pada kerja keras untuk bisa menguasai pasar internasional untuk suatu jenis komoditi yang yang dijadikan sasaran.¹

Jepang adalah salah satu negara pelopor sistem internasional pasar, ini merupakan bagian dari strategi Jepang setelah mengalami kekalahan total pada

¹ M. I. Kesinanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta, 1980, hal 4

Perang Dunia II. Sistem ini lebih ampuh daripada sistem ekspansi militer yang berusaha menjajah dan menguasai ekonomi negara-negara lain. Adanya kesadaran Jepang yang ingin maju bahwa bukan hanya kekuatan militer dan politik saja namun juga kekuatan ekonomi pasar sangat diperlukan agar dapat berkiprah dalam permainan pasar internasional.

Kemajuan yang dialami Jepang ditandai oleh banyaknya perusahaan-perusahaan yang berafiliasi Jepang yang tersebar di berbagai negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, diantaranya: *Hitachi Ltd, Honda Motor Co.,Ltd, Fuji Film Foto Co., Ltd, Mazda Motor Corporation, Mitsubishi Group, Nintendo Co., Ltd, dan Nissan Motor Co., Ltd.*

Di kawasan Asia Timur, investasi Jepang yang paling menonjol adalah di negara Korea Selatan dan Taiwan. Kedua negara ini yang seringkali dijuluki sebagai negara-negara yang termasuk dalam kelompok Negara Industri Baru (NIB) atau negara-negara yang berhasil dalam bidang industrialisasi. Sebagian besar investasi Jepang di kedua negara ini adalah dalam bidang manufaktur, yang telah berhasil mengantarkan kedua negara industri baru tersebut memasuki tahapan pengembangan industri elektronik, mesin, baja, bahan-bahan kimia, dan yang terakhir industri yang berteknologi tinggi, seperti komputer dan konduktor. Dapat dikatakan sukses yang diraih oleh Korea Selatan dan Taiwan adalah karena masuknya modal dan teknologi

Tabel 1.1
Perkembangan Ekspor Jepang tahun 1992-1997
(dalam miliar yen)

Negara	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Korea Selatan	1.465.88	1.297.32	1.379.83	1.622.18	1.735.33	1.762.76
RRC	2.144.78	2.278.03	2.811.40	3.380.88	4.399.68	5.061.67
Hong Kong	295.05	221.42	219.34	257.05	280.10	272.15

Sumber : "Value of Japan's Export and Import by Principal Country and Destination", diakses dari <http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.htm>, tanggal 25 maret 2007

Catatan:

Ekspor

Makanan: Ikan, kerang dan jamur shitake kering

Produk-produk industri ringan: serat katun, serat sintetis dan produk-produk tekstilsekunder (tidak termasuk pakaian).

Produk-produk kimia dan industri berat: barang-barang kimia (senyawa-senyawa organik, bahan-bahan plastik dan resin-resin buatan), logam batangan maupun bentukan (besi dan baja), kabel, pelat berat dan lembaran berat, pelat dan lembaran berlapis timah, pelat dan lembaran yang sudah digalvanis, hoops dan strips, tabung dan pipa serta sambungan-sambungan tabung dan pipa. Logam-logam bukan baja, tembaga dan campuran-campuran tembaga serta produk-produk logam (konstruksi dan bahan bangunan dari besi).

Permesinan dan peralatan (boiler dan peralatan boiler, internal combustion engines, mesin-mesin kantor, permesinan pekerjaan logam, permesinan konstruksi dan pertambangan, bearing permesinan cargo handling, artikel-artikel sirkuit listrik, peralatan-peralatan telekomunikasi dan permesinan keliatikan lainnya, instrumen-instrumen transportasi dan sejenis)

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara juga menjadi sasaran invasi perusahaan-perusahaan Jepang. Dalam hal ini adalah Malaysia, yang secara perlahan beranjak dari negara berkembang menjadi negara industri. Keberhasilan Malaysia menjadi sebuah negara industri ditandai dengan suksesnya Perusahaan Otomotif Proton Bhd yang mengeluarkan beberapa varian mobil diantaranya yaitu Proton Waja dan Proton Saga. Kedua kendaraan tersebut berasal dari hasil kerjasama perusahaan Proton Malaysia dengan Perusahaan Mitsubishi Jepang dengan menggunakan prototipe Mitsubishi Lancer.

Dari awal didirikan pada tahun 1985 hingga tahun 1994 industri otomotif Proton Malaysia berhasil berkembang secara pesat. Pada tahun pertama (*tahun 1986*) tingkat produksi Proton mencapai 7.500 unit dan tahun 1994 mencapai 127.000 unit. Pada tahun 1995 Proton mampu mengekspor mobil ke beberapa negara didunia seperti Afrika dan Timur Tengah. Selain itu pada tahun yang sama penjualan mobil proton di Malaysia menguasai tingkat sebesar 73 persen total penjualan mobil dalam negeri. Penjualan kendaraan Proton yang menjadi hasil kerjasama Jepang dan Malaysia dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Jumlah Penjualan Mobil Proton Sebagai Hasil Kerjasama Jepang-Malaysia

No	Tahun	Jumlah (unit)
		112.000
1	1994	127.000
2	1995	128.000
3	1996	132.000
4	1997	141.000*
5	1998	

Jumlah diatas merupakan jumlah penjualan seluruh varian mencakup Proton Saga, Waja, dan Delta. Sumber : Pikiran Rakyat, 30 Mei 2004, Mobil Motor, Edisi 02 XXXIV, 8 Februari 2004.

Dengan berhasilnya Malaysia memproduksi kendaraan sendiri, telah membawa dampak pada meningkatnya perekonomian negara tersebut. Dan secara perlahan Malaysia juga telah merubah image-nya dari negara berkembang menjadi negara industri maju.

Malaysia dengan segala kelebihanannya, tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan oleh Jepang. Sejak tahun 60an Jepang sudah memberikan bantuan ekonomi kepada Malaysia. Kemudian disusul dengan masuknya investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Masuknya investasi ini merupakan konsekuensi logis dari eratnya hubungan antara kalangan bisnis dan pemerintah dalam politik Jepang.

Dalam melaksanakan program bantuannya, pemerintah Jepang bekerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara penerima bantuan (*recipient*). Jika infrastruktur telah tersedia, maka perusahaan-perusahaan Jepang akan mulai menanamkan investasinya. Dengan demikian Jepang memperoleh keuntungan melalui FDI yang jauh melampaui besarnya bantuan.

Besarnya komitmen Jepang dalam membangun kerjasama dengan Malaysia dikemas dalam berbagai bentuk. Diantaranya: masuknya investasi dari Jepang ke Malaysia atau yang lebih dikenal dengan istilah *Foreign Direct Investment (FDI)* yang telah berlangsung sejak tahun 60an, dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah maupun pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah bantuan pembangunan resmi / *ODA (Official Development Assistance)*.²

B. Perumusan Masalah

Dibalik keseriusan Jepang dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Malaysia, tentunya Jepang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan baik di bidang ekonomi maupun politik.

Dari uraian diatas penulis merumuskan masalah "*Apa kepentingan Jepang dibalik kerjasama dengan Malaysia?*"

² Jepang Statistik Departemen Perdagangan Jepang Tahun 1997-1999 "Bantuan Jepang ke Malaysia"

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat macam-macam kerjasama yang dibentuk oleh Jepang-Malaysia dan bantuan-bantuan yang diberikan Jepang kepada Malaysia
2. Untuk mengetahui arti penting Malaysia bagi Jepang ditinjau dari aspek ekonomi politik

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas dan menganalisa masalah di atas maka penulis menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu:

1. Teori Kepentingan Nasional.

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku luar negeri suatu negara.

Salah satu ilmuwan yang terkenal dengan konsep ini adalah Jack C. Plano dan Ray Olton. Mereka menjelaskan kepentingan nasional sebagai berikut:

*“The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of a state is foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those alimnt that constitute the statemost vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic wellbeing”.*³

³Jack c. Plano and Ray Olton, *The International Relation Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University (Arling, Ohio, California 1989), hal 9

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda antara satu dengan negara lainnya, tergantung pada kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun para ahli cenderung menempatkan masalah *survival* dan *self preservation* sebagai prioritas utama. Dan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara.

Dalam konsep ini, ada lima kategori umum yang dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu: (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri; (2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain; (3) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity*, atau keutuhan wilayah dan (5) *economic wellbeing* atau kesejahteraan ekonomi.⁴

Dalam hal ini kemunculan globalisasi menjadikan Jepang merasa perlu khawatir untuk mengambil suatu tindakan preventif guna mengantisipasi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat dari adanya globalisasi. Kepentingan nasional disini bisa diterjemahkan sebagai keinginan politik yang dirasa sangat perlu untuk dilindungi dan diperjuangkan. Kepentingan ini berupa kepentingan ekonomi (*economic well being*) yang memang harus dimanifestasikan secara politik dengan inisiatif berupa pemberian bantuan ekonomi kepada Malaysia.

⁴ Jack c. Plano and Ray Olton, Op Cit. hal 128

Malaysia adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada saat dipimpin oleh PM Mahathir Muhammad. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tersebut seperti tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) selama beberapa tahun dan kontribusi investasi luar negeri yang sangat besar.

Kawasan Asia Tenggara khususnya Malaysia, adalah kawasan yang sangat menjanjikan bagi Jepang dari segi ekonomi. Karena negara ini termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak mentah dan gas alam yang bisa dimanfaatkan Jepang sebagai penjamin energi bagi kelangsungan industri di Jepang. Seperti yang kita ketahui Jepang termasuk negara industri yang miskin akan sumber daya alam.

Selain itu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dialami Malaysia dapat dimanfaatkan Jepang untuk menanamkan modal dan investasi bagi pengembangan industri di Malaysia, seperti sektor pertanian, industri otomotif, perkapalan, bidang manufaktur dan sebagainya. Melalui bantuan dan kerjasama ini dengan sendirinya Jepang telah memberikan hal positif bagi Malaysia khususnya tersedianya lapangan pekerjaan yang nantinya bermuara pada terciptanya stabilitas sosial di Malaysia. Dengan terciptanya stabilitas sosial di Malaysia, maka hal tersebut akan berdampak pada semakin banyaknya investasi Jepang yang masuk ke Malaysia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta Jepang.

2. Konsep Politik Luar Negeri

Dalam berhubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain.⁵ *Out put* kebijakan luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan tindakan atau gagasan yang telah dirancang sebelumnya oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah terhadap suatu perubahan dalam masyarakat internasional, yang berupa kebijakan, sikap atau tindakan negara lain.

Politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Menurut Cecil V Crabb, Jr dinyatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan kepentingan nasional dan sarana dari suatu negara. Jadi dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu tujuan-tujuan nasional (*national objective*) yang hendak dicapai dan sarana-sarana (*means*) untuk mencapainya.⁶

Hal ini diperjelas oleh K.J. Holsti,⁷ bahwa politik luar negeri sebagai suatu gambaran peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi dikemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah, melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap

⁵TB Millar, "On Writing About Foreign Policy", dalam James N Rossenau, *International Politics and Foreign Policy*, The Free Press, New York, 1969, hal 57

⁶Cecil V Crabb, Jr dalam Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1978, hal 87

⁷K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, terjemahan M. Thohir, Ashari, SU

negara lain, berdasarkan nilai yang diletakkan pada tujuan, unsur waktu dan jenis tuntutan terhadap negara lain dalam sistem.

Hubungan politik antara Jepang-Malaysia yang sudah terjalin sejak berakhirnya Perang Dunia II, ternyata mempunyai arti yang sangat penting dalam pencapaian kepentingan nasional Jepang, terutama dalam bidang-bidang investasi, bantuan luar negeri dan perdagangan. Secara khusus, sebenarnya tujuan dari kepentingan Jepang dalam membangun kerjasama dengan Malaysia adalah untuk menjamin tersedianya sumber daya dan energi yang akan digunakan Jepang untuk keberlangsungan industri-industri yang dimiliki Jepang. Selain daripada itu Malaysia juga bisa dijadikan Jepang sebagai kawasan pemasaran barang-barang yang diproduksi oleh Jepang, seperti alat-alat berat dan suku cadang perkapalan, mengingat Malaysia belum bisa memproduksi sendiri barang-barang tersebut karena keterbatasan teknologi yang dimiliki Malaysia.

E. Hipotesis

Kerjasama yang dibangun Jepang dengan Malaysia bermuara pada dua hal utama :

Pertama, sebagai penyedia bahan mentah dan energi yang akan digunakan Jepang sebagai bahan baku dan energi bagi kelangsungan produksi industri dalam negeri. Ditinjau dari aspek ekonomi-geografis Malaysia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi dan gas alam. Sementara Jepang adalah negara industri maju yang miskin akan sumber daya alam

Kedua, kerjasama antara Jepang dan Malaysia akan membawa dampak yang lebih menguntungkan bagi Jepang, yaitu sebagai pangsa pasar bagi barang-barang hasil industri Jepang.

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Eksplanatif*, metode ini dilakukan melalui pengumpulan data sehingga fakta yang tampak dapat diungkapkan sesuai dengan realitas yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data data, maka penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperoleh dari:

- a. Buku buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Surat kabar, artikel, literatur, dokumentasi dan hasil penelitian yang memfokuskan pada permasalahannya.
- c. Pencarian data melalui internet dan sumber-sumber lainnya.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimulai dari 1970an sampai tahun 1990an. Akan tetapi penelitian juga mencakup kejadian ditahun sebelum dan sesudahnya yang dianggap masih sesuai dan termasuk dalam pembahasan

H. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, nantinya akan dibagi menjadi lima bab. Dimana masing-masing bab memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Adapun pembagian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

a. Bab I

Merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang menceritakan secara ringkas permasalahan kemudian diajukan permasalahan yang diperkuat dengan teori, kerangka analisa, dan ditutup dengan hipotesa.

b. Bab II

Berisikan pembahasan tentang Konstitusi dan Dasar-dasar Politik Luar Negeri Jepang. Pasca Perang Dunia II, tampuk pemerintahan di Jepang sepenuhnya berada di bawah kontrol Amerika Serikat. Amerika Serikat sengaja memasung Jepang dengan mengubah isi undang-undang dan Konstitusi Jepang, yang salah satunya tertera dalam Bab II Pasal 9 UUD Jepang, yang isinya adalah melarang Jepang menggunakan lagi kekuatan militer untuk selamanya. Hal ini berdampak pada berubahnya tema sentral politik luar negeri Jepang yang kemudian terfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri. Dampak dari hal ini adalah Jepang kemudian memasuki masa stabilitas yang kemudian sangat mendukung pembangunan ekonomi, dan kemudian Jepang juga tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang setara dengan